

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Wacana Sertifikasi Pra Nikah Perspektif KUA Kecamatan Karangrejo Dan KUA Kecamatan Gondang Dan DPRD Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Muhamad Afif Bahtiaawan di bimbing oleh Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, M.Si, M.H.I dan Dr. H. Asmawi, M.Ag.

Kata kunci: Sertifikasi Pra Nikah Perspektif KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang dan DPRD Kabupaten Tulungagung.

Penelitian dalam Tesis ini dilator belakanginya oleh adanya sertifikasi pra nikah yang bakal dicanangkan Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia Kebudayaan atau Kemenko PMK. Menurut Menko Muhadjir Effendy, pembekalan pranikah adalah suatu hal yang penting. Pembekalan ini tak hanya berkaitan dengan agama, namun juga multiaspek. Nantinya, Kemenko PMK bakal menggandeng Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Namun, belakangan ini, wacana program sertifikasi pra nikah justru menimbulkan polemik atau pro-kontra. Maka dari itu pemerintah perlu mengkaji dan mempelajarinya lagi lebih mendalam terkait wacana sertifikasi pra nikah ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan sertifikasi pra nikah?, (2) Bagaimana wacana sertifikasi pra nikah perspektif KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang?, (3) Bagaimana program sertifikasi pra nikah perspektif DPRD Kabupaten Tulungagung?.

Metode penelitian dalam penulisan ini ialah menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis penelitian ini merupakan pengamatan wawancara dan dokumen. Dan juga teknik analisis data yang digunakan reduksi dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan wacana sertifikasi pra nikah dapat disimpulkan sebagai kelas bimbingan, sertifikasi pra nikah ini diadakan selama tiga bulan, bagi masyarakat yang dianggap sudah lolos akan diberikan sertifikat. Melalui kelas bimbingan, masyarakat yang akan berencana menikah diberi bekal mengenai pengetahuan seputar kesehatan reproduksi. Dalam melaksanakan program wacana sertifikasi pra nikah ini, kemenko PMK akan menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

(2) Menurut KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bahwa wacana aturan sertifikasi pra nikah itu sangat baik dan sangat setuju jika memang harus diperlakukan. Karena sertifikasi pra nikah ini akan menjadi penyempurna proses bimbingan sebelum nikah yang sudah ada didalam proses sebelum nikah. Akan tetapi dalam catatan prosesnya nanti tidak dipersulit.

(3) Program sertifikasi pra nikah menurut Dewan DPRD Kabupaten Tulungagung secara umum pada intinya para anggota dewan di DPRD Kabupaten Tulungagung bisa menerima dengan catatan dalam pelaksanaannya tidak mempersulit proses pernikahan. Dengan adanya program sertifikasi pra nikah ini calon pengantin bisa memahami dan mengerti tata cara berumah tangga yang baik menurut agama (Islam) dan mengerti tentang budaya hidup sehat sehingga bisa mengurangi adanya KDRT dan perceraian. Pihak DPRD Kabupaten Tulungagung sendiri kususunya dari pihak legislatif akan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan jika memang pemerintah pusat memberlakukan sertifikasi pra nikah menjadi peraturan. Sehingga pemerintah daerah akan selalu menindak lanjuti apa yang menjadi peraturan pemerintah pusat. Melihat

konsepnya secara umum banyak manfaat dari adanya program sertifikasi pranikah sebagai bekal calon pengantin untuk melaksanakan hidup berumah tangga, hanya saja jika dalam pelaksanaannya akan mempersulit persyaratan dalam proses pernikahan maka akan menjadi mudhorot.

ABSTRACT

The thesis with the title "Discourse on Pre-Marriage Certification Perspective of KUA, Karangrejo District and KUA, Gondang District and Tulungagung Regency DPRD" was written by Muhamad Afif Bahtiwawan under the guidance of Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, M.Si, M.H.I and Dr. H. Asmawi, M.Ag.

Keywords: Pre-Marriage Certification Perspective of KUA, Karangrejo District and KUA, Gondang District and Tulungagung Regency DPRD.

The research in this thesis is based on the background of the existence of pre-marriage certification which will be proclaimed by the Coordinating Ministry for Cultural Human Empowerment or the Coordinating Ministry for Human Development and Culture. According to Coordinating Minister Muhadjir Effendy, pre-marital debriefing is an important thing. This provision is not only related to religion, but also multi-aspects. Later, Kemenko PMK will collaborate with the Ministry of Religion and the Ministry of Health. However, recently, the discourse on the pre-marriage certification program has actually caused polemics or pros and cons. Therefore, the government needs to study and study it more deeply regarding the pre-marriage certification discourse.

The formulation of the problems in this research are: (1) How is the implementation of pre-marriage certification? (2) How is the discourse on pre-marriage certification from the perspective of KUA Karangrejo District and KUA Gondang District?.

The research method in this writing uses qualitative methods, namely the type of field research. The data collection techniques used by the authors of this study were observation interviews and documents. And also when realizing the data using deduction and drawing conclusions and verification.

The results of the analysis can be concluded that: (1) The implementation of pre-marriage certification discourse can be concluded as a guidance class, this pre-marriage certification is held for three months, for those who are deemed to have passed will be given a certificate. Through the guidance class, people who plan to marry are given provisions. regarding knowledge about reproductive health. In implementing this pre-marriage certification program, Kemenko PMK will collaborate with the Ministry of Religion (Kemenag) and the Ministry of Health (Kemenkes).

(2) According to KUA Karangrejo District and KUA Gondang District, Tulungagung Regency, the discourse on pre-marriage certification rules is very good and strongly agrees if it must be treated. Because this pre-marriage certification will complement the process of pre-marriage guidance that is already in the process before marriage. However, in the note the process will not be complicated later.

(3) The pre-marriage certification program according to the Tulungagung Regency DPRD Council in general, basically, the council members in the Tulungagung Regency DPRD can accept it provided that the implementation does not complicate the marriage process. With this pre-marriage certification program, the prospective bride and groom can understand and understand good housekeeping according to religion (Islam) and understand the culture of healthy living so that it can reduce the existence of domestic violence and divorce. The Tulungagung Regency DPRD itself, especially from the legislative side, will always follow the development of the laws and regulations if the central government makes pre-marriage certification a regulation. So that local governments will always follow up on what is the central government regulations. Seeing

the concept in general, there are many benefits from the existence of a prenuptial certification program as a provision for prospective brides to carry out married life, it's just that if in practice it will complicate the requirements in the marriage process it will be mudhorot.